

### **BAB III**

#### **SIX PARTY TALKS SEBAGAI SARANA UNTUK MENYELESAIKAN KRISIS NUKLIR KOREA UTARA**

Program pengembangan senjata nuklir Korea Utara dinilai mampu mengancam ketentraman dan stabilitas keamanan negara – negara Internasional, Amerika Serikat merasa berkewajiban dalam melakukan denuklirisasi di Korea Utara hal ini terkait dengan kepentingan Amerika Serikat dalam menjaga proliferasi nuklir dunia, oleh karena itu Amerika Serikat mengajak negara – negara lain untuk ikut serta dalam denuklirisasi Korea Utara.

Pada bulan April 1984, Korea Utara melaksanakan uji coba rudal Scud – B yang pertama. Uji coba tersebut membuat Uni Soviet menekan Korea Utara untuk bergabung dengan NPT pada tanggal 12 Desember 1985 dan menandatangani perjanjian NPT dimana Korea Utara tidak akan menyebarkan nuklir. Mikhail Gorbachev menekan Kim Il Sung dengan mengancam bahwa Moscow akan menghentikan bantuan ekonominya.

Korea Utara akhirnya megalah dan mendeklarasikan kepada IAEA keberadaan fasilitas Yongbyon. Korea Utara menandatangani perjanjian dengan IAEA untuk melaporkan keadaan program nuklirnya secara wajib dengan IAEA dimulai pada Januari 1992. Sesuai dengan perjanjian itu, IAEA melakukan enam kali inspeksi di Korea Utara dan menemukan bukti jejak bahwa beberapa kilogram plutonium yang bisa membuat senjata nuklir pernah diekstraksi, berbeda jauh laporan

Korea Utara yang mengatakan kepada IAEA bahwa mereka hanya mengekstraksi 90 gram bahan nuklir dari fasilitas nuklirnya.

Dengan hasil inspeksi itu, pihak IAEA meminta pemeriksaan khusus<sup>1</sup>. Karena Korea Utara merasa mendapatkan tekanan yang bertubi-tubi akhirnya pada tahun 2003 Korea Utara keluar dari perjanjian Non Proliferasi Nuklir Untuk mengatasi masalah tersebut, Amerika Serikat kemudian mengusulkan Six Party Talks yang melibatkan Korea Selatan, Korea Utara, Amerika Serikat, Jepang, China, dan Rusia.

#### **A. Sekilas Tentang Six Party Talks**

Perundingan enam negara atau biasa disebut Six Party Talks adalah pertemuan yang diadakan antara enam negara mengenai masalah program nuklir Korea Utara, forum Six Party Talks tersebut berisikan negara – negara yang mempunyai pengaruh dan kekuatan besar di dunia seperti Uni Soviet, Amerika Serikat, China, Korea Utara, Korea Selatan dan Jepang.

Six Party Talks berdiri sebagai sebuah Rezim Internasional yang menurut Krasner Rezim Internasional adalah sebuah kumpulan prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pengambilan keputusan, baik secara eksplisit maupun implisit, demi menciptakan interaksi yang koheren antar aktor internasional<sup>2</sup>. Prinsip merupakan keyakinan atas fakta, sebab, dan kebenaran. Norma merupakan standar perilaku

---

<sup>1</sup> KBS. 2012. “Isu Nuklir Korea Utara”. [http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea\\_nuclear/faq\\_01.htm#7](http://world.kbs.co.kr/indonesian/event/nkorea_nuclear/faq_01.htm#7). Diakses pada 24/12/2016 Pukul 4:25

<sup>2</sup> Krasner, Stephan D. 1982. *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables*. Cornell University Press, hlm. 185

berdasarkan oleh hak dan kewajiban. Peraturan merupakan ketentuan maupun larangan spesifik atas suatu aksi.

Prosedur pengambilan keputusan merupakan praktik yang berlaku untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan umum. Kepentingan rezim timbul karena adanya ketidakpuasan akan konsep dominan dari tata aturan internasional, kewenangan, dan organisasi<sup>3</sup>. Definisi rezim berbeda dengan definisi kerjasama terutama dengan definisi dari institusi.

Rezim merupakan contoh dari perilaku kerjasama dan upaya untuk memfasilitasi kerjasama, namun kerjasama dapat terjadi tanpa adanya rezim terlebih dahulu<sup>4</sup>. Perbedaan mendasar antara rezim dengan institusi adalah cara kedua hal ini dalam memandang aktor – aktor dalam hubungan internasional terutama organisasi internasional.

Rezim mengacu pada pengaruh perilaku yang ditimbulkan dari organisasi internasional pada aktor-aktor yang lainnya, terutama aktor negara. Rezim berfokus pada ekspektasi aktor, berbeda dengan institusi yang lebih melihat kepada apa yang terjadi dalam organisasi daripada melihat pengaruh yang ditimbulkan organisasi internasional terhadap aktor-aktor lainnya<sup>5</sup>. Jadi pada dasarnya Six Party Talks adalah sebuah Rezim Internasional yang berusaha mencoba mengatur segala norma, aturan, dan perilaku aktor – aktor Internasional yang terkait krisis nuklir di Semenanjung Korea.

---

<sup>3</sup> Haggard, Stephan dan Simmons, Beth A. 1987. *Theories of International Regimes*. International Organization, Vol. 41. Cambridge: MIT Press, hlm. 491

<sup>4</sup> *Ibid.* hlm. 495

<sup>5</sup> Barkin, J Samuel. 2006. *International Organization: Theories and Institutions*. New York: Palgrave Macmillan, hlm. 27

## **B. Sejarah dan Tujuan Six Party Talks**

Pada masa kepemimpinan Presiden Bush, Korea Utara secara resmi telah menyatakan bahwa negaranya memiliki senjata nuklir yang berbasis pengayaan uranium. Kabar tersebut diterima pada Oktober 2002 yang disampaikan oleh Menteri luar negeri Amerika Serikat James Kelly pada saat dirinya berada di Pyongyang.<sup>6</sup> Secara diam – diam program pengembangan nuklir milik Korea Utara sudah berbeda dengan yang program nuklir nya pada tahun 1995 yang pada saat itu hanya berbasis pemrosesan ulang uranium.<sup>7</sup>

Perkembangan tersebut banyak mengejutkan pihak – pihak yang selama ini mengawasi Korea Utara, terutama Amerika Serikat. Pada waktu yang bersamaan Korea Utara juga telah melanggar perjanjian Agreed Framework<sup>8</sup> yang disetujui sebelumnya yaitu pengawasan oleh Badan Atom Internasional atau IAEA atas penghentian fasilitas nuklir milik Korea Utara. Para pejabat dan staff dari IAEA yang sedang berada di fasilitas nuklir diusir oleh Korea Utara dengan alasan mereka akan mengaktifkan kembali fasilitas nuklir yang berdaya 5 megawatt tersebut.

Amerika Serikat sebagai kekuatan besar dunia merasa dicurangi dan dibohongi atas kembali berulahnya Korea Utara yang mengundurkan diri dari NPT pada tahun 2003<sup>9</sup>. Atas perbuatan nya tersebut Amerika Serikat langsung

---

<sup>6</sup> Park dan Kim, 2012. Understanding North Korea. hlm.133

<sup>7</sup> Zhongying, 2009. The Six-Party Process, Regional Security Mechanisms, and China-US Cooperation: Toward a Regional Security Mechanism for a New Northeast Asia., hlm. 12

<sup>8</sup> Lihat Lampiran

<sup>9</sup> Niksch, 2005. North Korea's Nuclear Weapon Program

menghentikan pengiriman bantuan bahan bakar dan merencanakan penyerangan kepada fasilitas nuklir Korea Utara untuk mencegah keadaan semakin memburuk.

Sebelum munculnya Six Party Talks, presiden Amerika Serikat pada saat itu Bush pada awal 2003 mengusulkan dibentuknya forum multilateral untuk membahas dan menyelesaikan krisis nuklir Korea Utara dengan jalur diplomasi. Kemudian dibuatlah forum multilateral tiga Negara yang pada saat itu disebut dengan Trilateral Talks. Forum pertemuan tiga Negara tersebut melibatkan Korea Utara, China dan Amerika Serikat dan diadakan di Beijing pada tahun 2003.

Pada awalnya Korea Utara tetap bersikeras untuk melakukan pembicaraan bilateral dengan Amerika Serikat, karena pada dasarnya Korea Utara mengetahui bahwa pertemuan multilateral ini adalah salah satu cara Amerika Serikat dalam membangun opini publik bahwa Korea Utara adalah penyebab utama terjadinya krisis nuklir di Semenanjung Korea<sup>10</sup>.

Sebelum memastikan bergabungnya Korea Utara dalam perundingan trilateral talks Korea Utara ingin memastikan terlebih dulu apakah Amerika Serikat akan mencabut sikap permusuhan nya apa tidak. Jika sekiranya Amerika tidak akan mencabut sikap permusuhan nya maka Korea Utara tidak akan masuk ke dalam dialog tersebut<sup>11</sup>

Sejak dimulainya Trilateral Talks Amerika Serikat terus dengan gencar menyuarakan bahwa penyelesaian krisis nuklir harus melalui format multilateral talks

---

<sup>10</sup> U.S. urged not to fault DPRK's self-defensive measure." <http://www.kcna.co.jp>

<sup>11</sup> U.S. insistence on "five-party talks" rebuffed." <http://www.kcna.co.jp> Diakses pada 24/06/2017 Pukul 19:30

yang melibatkan banyak actor Negara karena menurut Amerika Serikat semua actor memiliki kekhawatiran yang sama atas krisis nuklir yang terjadi di Semenanjung Korea.

Sampai pada pertemuan terakhir forum Trilateral Talks akhirnya tercapai sebuah kesepakatan untuk membentuk forum multilateral yang lebih luas, yaitu dengan membentuk forum Six Party Talks yang kita kenal saat ini, forum six party talks tersebut berisikan Negara – Negara yang mempunyai pengaruh dan kekuatan besar di dunia seperti Uni Soviet, Amerika Serikat, China, Korea Utara, Korea Selatan dan Jepang.

Isu nuklir yang terjadi di Korea Utara menjadi cikal bakal berdirinya Trilateral Talks yang akhirnya berevolusi menjadi Six Party Talks. Pada dasarnya tujuan dari kedua forum tersebut tetaplah sama yaitu menyelesaikan krisis nuklir yang terjadi di Semenanjung Korea dengan cara diplomasi. Pengunduran diri Korea Utara dari perjanjian NPT pada tahun 2003 juga menjadi pemicu berdirinya forum Six Party Talks, peran Amerika dan China sebagai pemegang kekuatan di regionalnya masing – masing juga sangat berpengaruh karena sama – sama memiliki tanggung jawab global untuk menjaga perdamaian dunia.

Kekhawatiran pihak Amerika Serikat telah muncul sejak dimulainya program pengembangan nuklir pada tahun 1950an yang dibantu oleh pihak Uni Soviet. Sebagai Negara besar Amerika telah menggunakan berbagai macam cara untuk membuat Korea Utara menghentikan program pengembangannya, salah satu

cara yang dilakuakn oleh Amerika Serikat adalah sanksi ekonomi yang dijatuhkan kepada Korea Utara, namun Nampak nya sanksi tersebut tidak cukup untuk membuat Korea Utara berhenti untuk terus mengembangkan nuklirnya.

Forum six party talks dan trilateral talks adalah juga merupakan cara dari Amerika Serikat membujuk Korea Utara untuk menghentikan program nuklir nya. Tujuan utama dibentuknya six party talks adalah untuk membongkar fasilitas nuklir dan program pengembangan nuklir Korea Utara melalu jalur negosiasi.

Pengunduran diri Korea Utara dari perjanjian NPT pada tahun 2003 juga menjadi pemicu berdirinya forum Six Party Talks, peran Amerika dan China sebagai pemegang kekuatan di regional nya masing – masing juga sangat berpengaruh karena sama – sama memilik tanggung jawab global untuk menjaga perdamaian dunia.

### C. Perkembangan Six Party Talks

Tabel Perkembangan Six Party Talks 3.1

Putaran	Waktu	Pembahasan
Pertama	Aug,27-29-2003	Pembentukan konsensus tentang denuklirisasi Semenanjung Korea dan prinsip resolusi damai melalui dialog .
Kedua	Feb, 25-28-2004	Penegasan kembali konsensus tentang denuklirisasi Semenanjung Korea dan prinsip resolusi damai
Ketiga	Jun, 23-26-2004	Pembentukan konsensus tentang perlunya tindakan awal untuk denuklirisasi Semenanjung Korea dan proses bertahap berdasarkan prinsip " <i>commitment for commitment, action for action</i> "
Keempat	Jul 26, Aug 7-2005	Sesi I : Korea Utara tetap menolak terdapat pengayaan uranium di wilayahnya sebagaimana yang selalu dituduhkan AS
	Sep, 13-19-2005	Sesi II : sebuah pernyataan bersama ( <i>Joint Statement</i> ) yang akan menjadi sebuah pedoman atas prinsip damai untuk mengakhiri krisis nuklir Korea Utara
Kelima	Nov, 9-11-2005	Kesepakatan dalam " <i>Initial implementations measures of the September 19 Joint Statement (February 13 Agreements)</i> ". semua pihak sepakat mengambil langkah-langkah terkoordinasi untuk melaksanakan pernyataan bersama secara bertahap, dimana sejalan dengan prinsip " <i>action for action</i> ".
Keenam	Februari 2007	dikeluarkan dokumen <i>Second-Phase Actions for The Implementation of The Joint Statement</i> , dimana Pemerintah Amerika Serikat dan Korea Utara berkomitmen untuk meningkatkan hubungan bilateralnya dan mengembangkan hubungan diplomatiknya.

Rincian kegiatan yang telah dilakukan yaitu, putaran pertama dilakukan pada bulan Agustus 2003 di Beijing. Dalam perundingan Six Party Talks yang pertama ini para petinggi dari keenam negara mulai berbicara tentang bagaimana Six Party Talks akan bertindak dalam menghadapi krisis nuklir Korea Utara. Penggunaan prinsip damai dan negosiasi dalam mengatasi krisis nuklir adalah pedoman yang akan selalu digaungkan dalam perundingan tersebut, walaupun perundingan putaran pertama

tersebut belum mencapai kesepakatan namun setidaknya perundingan tersebut berhasil menjadi pemicu untuk menumbuhkan kepekaan para anggota lain.

Pada tanggal 25 - 28 Februari 2004 China memfasilitasi untuk melaksanakan perundingan Six Party Talks putaran kedua. Dalam perundingan tersebut banyak dibicarakan tentang resolusi damai dalam rangka menyelesaikan krisis nuklir yang saat itu mengancam stabilitas keamanan di regional Asia timur. Selain itu, disepakati juga bahwa tujuan umum dari perundingan Six Party Talks adalah untuk mewujudkan denuklirisasi di kawasan Asia timur<sup>12</sup>.

Perundingan Six Party Talks putaran ketiga dilaksanakan pada tanggal 23 – 26 Juni 2004. Dalam perundingan kali ini ada sedikit perbedaan pandangan dari pihak Korea Utara dan para anggota Six Party Talks lainnya. Korea Utara beranggapan bahwa yang dimaksud dari denuklirisasi adalah melucuti semua persenjataan yang berbasis nuklir tetapi tidak termasuk program pengembangan uranium.

Berbeda dengan Korea Utara negara anggota yang lain beranggapan bahwa program pengembangan uranium juga harus ikut serta dihentikan karena mereka khawatir akan timbulnya penyelewengan akan hasil dari uranium tersebut yang akhirnya kembali mengarah pada program nuklir. Sama seperti putaran kedua, putaran ketiga ini pun belum menghasilkan kemajuan yang berarti<sup>13</sup>. Perundingan

---

<sup>12</sup> The Second Round of the Six-Party Talks. (Online). [http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n\\_korea/6party0402.html](http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/6party0402.html) Diakses pada 28/12/16 pukul 3:20

<sup>13</sup> Third Round of Six-Party Talks Concerning North Korean Nuclear Issues. [http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n\\_korea/6party/talk0406.html](http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/6party/talk0406.html) ” Diakses pada 28/12/2016 Pukul 3:27

ketiga ini justru membuat Korea Utara menolak hadir pada perundingan Six Party Talks pada bulan September 2004.

Putaran keempat kali ini diselenggarakan sedikit berbeda karena dilaksanakan dalam dua tahap di Beijing. Tahap pertama berlangsung sejak 26 Juli hingga 7 Agustus tahun 2005. Dan tahap kedua dilaksanakan sejak 13 – 19 September 2005. Pada pertemuan kali ini pihak dari Korea Utara kembali menegaskan bahwa mereka akan mematuhi deklarasi denuklirisasi Korea Utara tahun 1992 untuk tidak menerima dan menyebarkan senjata nuklir.

Putaran kelima Six Party Talks berlangsung pada 19 September 2005. Putaran kali ini diwarnai dengan peristiwa dibekukannya rekening Korea Utara oleh Amerika Serikat selaku Dewan keamanan PBB karena diduga bahwa uang tersebut adalah hasil pencucian uang. Akibat dari peristiwa tersebut Six Party Talks putaran kelima mengalami kemunduran hingga tahun 2006, dimana Korea Utara melakukan uji coba senjata nuklirnya ditahun yang sama.

Taepodong adalah senjata nuklir yang mempunyai daya jelajah cukup tinggi bahkan diperkirakan bisa mencapai Hawaii dan beberapa bagian Alaska<sup>14</sup>. Perundingan Six Party Talks kembali bergulir pada bulan Desember namun kembali tidak menghasilkan kesepakatan apapun, Amerika Serikat kemudian mengambil siasat untuk mengajak Korea Utara berdialog secara bilateral diluar perundingan Six Party Talks. Korea Utara setuju dan terjadilah pertemuan antara utusan Amerika

---

<sup>14</sup> North Korea's Nuclear Test and its Aftermath: Coping with the Fallout",  
"[http://www.nti.org/e\\_research/e3\\_north\\_korea\\_nuclear\\_test.html](http://www.nti.org/e_research/e3_north_korea_nuclear_test.html)", Diakses pada tanggal 28/12/2016 Pukul 3:33

Serikat dan Korea Utara di Berlin yang menghasilkan kesepakatan baru yang diresmikan pada tanggal 13 Februari saat perundingan Six Party Talks putaran kelima resmi berakhir.

Perundingan Six Party Talks putaran keenam dilaksanakan pada bulan Februari 2007. Perundingan ini membicarakan tentang rencana denuklirisasi dimana negara anggota yang lain memberi waktu sampai dengan 6 hari kepada Korea Utara untuk membekukan program pengembangan nuklir nya. Pyongyang pada akhirnya melaksanakan program denuklirisasi nuklir nya dengan melucuti senjata – senjata nuklir yang ada di Yongbyon.

Pada bulan Oktober Pyongyang telah menyetujui dan berjanji untuk menghentikan program pengembangan nuklir nya dengan imbalan bantuan dan koneksi diplomatik. Pada perundingan tahap kedua dikeluarkan dokumen Second Phase Actions for The Implementation of The Joint Statement<sup>15</sup>, dimana Pemerintah Amerika Serikat dan Korea Utara berkomitmen untuk meningkatkan hubungan bilateralnya dan mengembangkan hubungan diplomatiknya<sup>16</sup>.

#### **D. Pencapaian Six Party Talks Menangani Krisis Nuklir Korea Utara**

Perjuangan Six Party Talks dalam mewujudkan denuklirisasi Korea Utara merupakan bukan hal yang mudah, serangkaian proses diplomasi yang panjang dan berliku telah dilalui baik secara lancar maupun alot. Titik terang muncul pada saat dibentuk nya Joint Statement pada tahun 2005 yang kemudian berlanjut pada Beijing

---

<sup>15</sup> Lihat Lampiran

<sup>16</sup> Major Facts About Six Party Talks, "<http://english.peopledaily.com.cn/90001/90777/90851/6636560.html>"  
Diakses pada 28/12/2016 Pukul 3:36

Statement pada tahun 2007. Disepakatinya Joint Statement menandakan bahwa perjuangan Forum Six Party Talks selama ini telah menunjukkan tanda – tanda perkembangan yang positif.

Pada dasarnya Joint Statement adalah sebuah kesepakatan yang berisikan bahwa Korea Utara akan meninggalkan semua persenjataan nuklir dan program nuklirnya. Korea Utara juga bersedia menerima pemeriksaan dari IAEA, Putaran ketiga juga menghasilkan sesuatu yang cukup baik karena semua anggota Six Party Talks telah menyetujui Beijing Agreement yang akhirnya menuntut Korea Utara untuk membuat deklarasi yang benar dan lengkap dari semua program nuklirnya.

Dalam enam tahun perjuangan Six Party Talks ada berbagai pencapaian yang telah terjadi dalam periode tersebut, disini penulis akan coba menjabarkannya satu – satu secara terperinci.

## **1. Pelucutan Fasilitas Nuklir Korea Utara**

Salah satu pencapaian terbesar yang dilakukannya oleh forum multilateral Six Party Talks adalah ketika Korea Utara menyetujui pembongkaran fasilitas nuklirnya setelah menyetujui Joint Statement pada 19 September 2005<sup>17</sup>.

Poin yang disepakati dalam Joint Statement adalah sebagai berikut :

### ***a) Pembongkaran Fasilitas Nuklir***

- Korea Utara bersedia untuk meninggalkan semua fasilitas nuklir dan program pengembangan nuklir yang dimilikinya.

---

<sup>17</sup> Lihat Lampiran

- AS mendeklarasikan bahwa kehadiran nya di Semenanjung Korea adalah bukan untuk menginvasi Korea Utara, As juga berjanji akan menjamin keamanan Korea Utara selama proses pembongkaran.

- Korea Utara menyatakan bahawa memilik hak untuk menggunakan energi nuklir secara damai.

***b) Normalisasi Hubungan***

- Korea Utara dan Amerika Serikat berjanji akan berusaha memperbaiki hubungan mereka dan hidup berdampingan dan saling menghormati kedaulatan masing – masing Negara.

- Korea Utara dan Jepang juga mencoba memperbaiki hubungan mereka secara bertahap.

***c) Bantuan Internasional untuk Korea Utara***

- Seluruh Anggota Six Party Talks akan meningkatkan kerjasama dalam bidang energi, ekonomi, investasi dan perdagangan.

- China, Jepang, Korea Selatan, Rusia dan AS bersedia menyediakan bantuan energi kepada Korea Utara sebagai kompensasi.

***d) Visi Perdamaian dan Stabilitas di Semenanjung Korea dan Asia Timur***

- Rencana tentang rezim perdamaian permanen di Semenanjung Korea akan dibicarakan lebih lanjut dalam forum yang terpisah.

- Anggota Six Party Talks setuju untuk meningkatkan keamanan di kawasan Asia Timur.

*e) Prinsip-prinsip untuk Implementasi*

- Para anggota Six Party Talks setuju untuk mengambil langkah yang terkoordinasi dengan baik dalam mengimplementasikan konsensus yang ada, komitmen per komitmen dan action per action.

Atas dasar pernyataan Korea Utara bahwa mereka memiliki hak untuk menggunakan energi nuklir dengan damai Pyongyang mengajukan permintaan kepada Amerika Serikat untuk menyediakan reaktor air ringan. Namun permintaan Korea Utara ini malah mengundang perdebatan karena Amerika Serikat menganggap bahwa Korea Utara tidak seharusnya mendapatkan reaktor nuklir jenis apapun. Pihak – pihak lain nya menghormati keinginan Korea Utara dan berjanji akan membicarakan nya lagi di lain hari.

Beberapa kali Korea Utara mendeklarasikan bahwa dirinya akan segera melakukan pembongkaran terhadap fasilitas nuklir nya, namun ternyata pembongkaran tersebut belum dapat diimplementasikan dalam aksi nyata dan hanya menjadi isu. Walaupun pada faktanya Korea Utara telah menyetujui kesepakatan yang dibuat dalam forum Six Party Talks. IAEA melaporkan bahwa Korea Utara sempat melakukan penutupan pada fasilitas nuklir nya pada Juni 2007.

Namun pada faktanya semua itu hanya sementara, karena buktinya Korea Utara kembali mengaktifkan kembali program pengembangan nuklirnya setelah

kesepakatan menemui jalan buntu. Tujuan Six Party Talks untuk melakukan denuklirisasi Korea Utara masih belum bisa terwujud lantaran banyak konflik internal yang terjadi antar anggota Six Party Talks.

## **2. Stabilisasi Hubungan Antar Anggota Six Party Talks**

Pembicaraan bilateral yang sering terjadi akibat kehadiran Six Party Talks tak sedikit menghasilkan kesepakatan – kesepakatan antar anggota forum. Contohnya adalah pada salah satu poin yang ada pada Joint Statement 19 September 2005, Korea Utara dan Amerika Serikat berjanji akan berusaha memperbaiki hubungan mereka dan hidup berdampingan dan saling menghormati kedaulatan masing – masing Negara selain itu Korea Utara dan Jepang juga mencoba memperbaiki hubungan mereka secara bertahap.

Amerika Serikat dan Korea Utara juga turut membicarakan permasalahan Banco Delta Asia, kurang lebih dua kali sudah AS dan Korea Utara melakukan pertemuan bilateral dan pada akhirnya mereka setuju untuk menyelesaikan masalahnya secara damai. AS juga akan mempertimbangkan kembali soal sanksi ekonomi yang dibebankan kepada Korea Utara akibat kasus Banco Delta Asia.

Korea Utara dan Jepang juga sempat melakukan pembicaraan bilateral mengenai pencabutan larangan berpegian bagi warganya untuk ke Korea Utara dan Jepang. Selain itu mereka juga membicarakan perihal pelabuhan Jepang yang terlarang bagi Korea Utara.

Six Party Talks juga berjasa dalam stabilisasi hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Korea Utara, Walaupun pada faktanya mereka pernah terlibat dalam Perang Korea pada tahun 1950an namun kini hubungan mereka mulai kian membaik. Kunjungan Presiden Korea Selatan Roh Moo-hyun ke Pyongyang pada 4 Oktober 2007 menandakan bahwa membaik nya hubungan bilateral antara kedua Negara. Kunjungan tersebut juga dimaksudkan untuk membahas prospek rekonsiliasi dan kerjasama ekonomi antara Korea Selatan dan Korea Utara.

Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa poin yang dinilai cukup penting dalam perkembangan perdamaian di Semenanjung Korea. Poin penting dalam pertemuan tersebut salah satunya adalah pihak Korea Selatan dan Korea Utara setuju untuk mengambil langkah – langkah menuju reunifikasi, menurunkan ketegangan militer antar Negara serta aktif dalam melakukan pertukaran sosial dan budaya.

### **3. Kerjasama Anggota Six Party Talks Dengan Korea Utara**

Dalam mengimplementasikan perjanjian yang telah disetujui pada Joint Statement 19 September 2005. Korea Utara mengaharpakan adanya imbalan dan jaminan sebelum akhirnya mereka harus membongkar fasilitas nuklir miliknya. Anggota Six Party Talks wajib memberikan bantuan internasional kepada Korea Utara dan menghapuskan sanksi ekonomi yang dibebankan kepada Pyongyang.

Keenam anggota juga telah sepakat untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi, bidang energi, perdagangan, dan investasi. China, Jepang, Korea Selatan, Rusia dan AS menyatakan keinginannya menyediakan bantuan energi untuk

Korea Utara. Semua imbalan dan bantuan ini diharapkan menjadi salah satu alasan yang kuat untuk mendorong Korea Utara membongkar fasilitas nuklir miliknya.

Untuk meningkatkan kerjasama dalam sektor ekonomi Korea Utara meminta kepada AS untuk menghapuskan sanksi ekonomi yang dibebankan kepadanya<sup>18</sup>, tidak hanya itu Korea Utara juga meminta untuk dapat mencairkan asetnya yang berada di Banco Delta Asia Macau. Walaupun pada awalnya AS mencurigai bahwa aset Korea Utara yang berada di BDA adalah hasil dari perdagangan obat dan senjata terlarang, namun AS kini telah bersedia untuk menghapus sanksi tersebut dan juga menghapuskan Korea Utara dari daftar Negara yang mendukung Terorisme.

Setelah terbentuknya kerjasama antar anggota Six Party Talks yang terjalin cukup baik dan telah turunnya bantuan – bantuan seperti yang dijanjikan untuk Korea Utara, kerjasama itu pun terhenti pada tahun 2009. Penghentian kerjasama tersebut bukan tanpa alasan, ini semua diakibatkan Korea Utara yang menolak verifikasi fasilitas nuklir oleh IAEA.

Korea Utara menganggap bahwa hanya fasilitas di kawasan Pyongyang yang dapat diakses oleh IAEA. Tidak seluruh fasilitas dapat diakses. Setelah penolakan tersebut, tak lama Korea Utara melakukan uji coba nuklirnya pada tahun 2009.

#### **4. Perdamaian Semananjung Korea**

Six Party Talks mendorong Korea Utara untuk segera menghentikan perkembangan program nuklirnya. Dalam mewujudkan stabilitas kawasan

---

<sup>18</sup> De Ceuster, Koen dan Jan Melissen. 2008. Ending The North Korean Nuclear Crisis: Six Parties, Six Perspectives. Den Hag: Desiree Davidse. hlm. 17

Semenanjung Korea dan Asia Timur yang damai, Six Party Talks berinisiatif untuk memberikan insentif bagi Korea Utara agar Korea Utara bersedia meninggalkan program nuklirnya. Insentif tersebut berupa pemberian bantuan energi dan ekonomi untuk Korea Utara.

Perlahan – lahan Korea Utara mulai bersedia meninggalkan program nuklirnya akibat dari pemberian insentif tersebut sejak Six Party Talks berdiri pada 2003. Upaya ini diyakini mampu mendorong Korea Utara memperkecil konflik yang terjadi di Semenanjung Korea. Pembahasan mengenai pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan Semenanjung Korea telah dimasukkan dalam agenda pembicaraan Six Party Talks.

Sebagaimana yang tertuang pada salah satu poin dalam Joint Statement bahwa para pihak Six Party Talks yang terkait secara langsung akan menegosiasikan rezim perdamaian permanen di Semenanjung Korea pada sebuah forum terpisah yang sesuai. Keenam pihak juga sepakat untuk mengeksplorasi cara dan sarana untuk meningkatkan kerjasama keamanan di Asia Timur.

Setelah melihat perkembangan Six Party Talks sejak pendiriannya, kawasan Semenanjung Korea terlihat lebih stabil dimana aksi provokasi Korea Utara yang dapat mengganggu stabilitas kawasan dapat diminimalisir berkat kehadiran Six Party Talks. Hal ini dikarenakan terdapat penurunan aktivitas nuklir Korea Utara sejak Korea Utara masuk menjadi anggota Six Party Talks tahun 2003 hingga Korea Utara keluar dari forum ini tahun 2009.

Atas dasar tersebut, Six Party Talks dianggap mampu membawa perubahan dengan menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan di Semenanjung Korea dan kawasan Asia Timur. Bantuan energi yang disediakan negara anggota Six Party Talks ternyata mampu memberikan dampak positif bagi kemajuan perdamaian dan stabilitas kawasan Semenanjung Korea selama tahun 2003-2009. Terbukti dengan masuknya Korea Utara ke dalam Six Party Talks, aktivitas Korea Utara mampu dikendalikan dengan menawarkan insentif bagi Korea Utara walaupun cara ini hanya berdampak sementara.

Six Party Talks tidak dapat memberikan sanksi hukum yang tegas, karena ketiadaan aturan yang mengikat. Untuk melihat seberapa jauh pencapaian sebuah institusi, maka dapat dilihat kontribusi yang telah diberikan institusi tersebut dalam mencapai tujuan utamanya. Beberapa kontribusi Six Party Talks yang telah dijabarkan di atas menjadi gambaran seberapa besar peran Six Party Talks dalam menyelesaikan isu dan masalah penting yang dihadapi oleh negara anggotanya.